PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

PEKERJAAN :
PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

DENGAN

DIREKTUR
PT. MANIK SEKECAP KARYA

NOMOR	:	**B.25.600.1.15.2/5047/CK/DISPUPR.PERKIM (PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK)** **023/07/MSK/IV/2026 (PENYEDIA)**
TANGGAL	:	**28 APRIL 2026**
NILAI KONTRAK	:	**RP. 54.606.548.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)**

TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

---

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BALI
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

DENGAN

DIREKTUR
PT. MANIK SEKECAP KARYA

NOMOR	:	**B.25.600.1.15.2/5047/CK/DISPUPR.PERKIM (PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK)**
		023/07/MSK/IV/2026 (PENYEDIA)
TANGGAL	:	**28 April 2026**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Denpasar**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I.	Nama	:	**I Made Mahardika, S.T., M.T.**
	Jabatan	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019; 5.1.05 Belanja Hibah) selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak
	Alamat	:	Jalan Beliton Nomor 2, Denpasar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor : B.25.100.3/4702/SEKRET/DISPUPR.PERKIM, tanggal 14 April 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor : B.25.100.3/125/SEKRET/DISPUPR.PERKIM tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Bidang Cipta Karya, selanjutnya disebut: **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**.

2. Nama : **Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM**
   Jabatan : Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA
   Alamat : Jl. Blumbungan Br. Parekan, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Badung

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. MANIK SEKECAP KARYA** beralamat di Jl. Blumbungan Br. Parekan, Ds. Sibang Gede, Kec. Abiansemal Badung berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 16 Tanggal 19 Nopember 2024 Notaris Ni Luh Amik Muryatini, SH. alamat Jl. Raya Padang Luwih Pertokoan Sutramas Blok A1 Badung yang selanjutnya disebut: **PENYEDIA.**

dan dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Bertahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia;

10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
12. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR;
13. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Tertib Evaluasi Kewajaran Harga;
14. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi dan Teknis;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/DK/2025 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026;
19. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Sektoral Bali Tahun 2026;
20. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Bali No. DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April 2026;
21. Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Bali Nomor: B.25.100.3/4702/SEKRET/DISPUPR.PERKIM tentang Penetapan/Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2026;
22. SNI 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Gedung;
23. SKSNI T-15-1991-03 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.
24. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971);
25. Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPB NI-3/56);
26. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI 1982);
27. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
28. Peraturan-peraturan terkait lainnya di Indonesia mengenai pengarahan tenaga kerja.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

a. Telah dilakukan proses pemilihan PENYEDIA yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
b. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK telah menunjuk PENYEDIA menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan PENYEDIA Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)**, sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan**

Konstruksi";

c. PENYEDIA telah menyatakan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
d. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat para pihak;
e. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan Perjanjian Kerja melaksanakan **Pekerjaan "Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)"** pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian (KONTRAK) ini.

Pasal 2
TUJUAN KONTRAK

Tujuan Perjanjian Kerja ini, untuk melaksanakan pekerjaan hasil tender **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)**, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sumber dana APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 yang tertuang di dalam DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
Pura Catur Loka Pala

A. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
B. Pura Gelap
   I. Pekerjaan Penataan Halaman
   II. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
   III. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
C. Pura Kiduling Kreteg
   I. Pekerjaan Penataan Halaman
   II. Pekerjaan Wantilan
   III. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
   IV. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
D. Pura Ulun Kul-kul
   I. Pekerjaan Penataan Halaman
   II. Pekerjaan Toilet dan genah Ngastawa
   III. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
   IV. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing
E. Pura Batu Madeg
   I. Pekerjaan Penataan Halaman
   II. Pekerjaan Bale Pesandekan dan Bale Banten
   III. Pekerjaan Rehabilitasi Pelinggih
   IV. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Dan Plumbing

Pasal 4
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga serta sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati dan tercantum didalam B.A. Persiapan penandatanganan kontrak sebesar **Rp. 54.606.548.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan kode rekening 1.03.09.1.01.0019.5.1.05.05.001.00002 untuk Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan **"Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)"**, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumah an dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
(2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali No. DPPA/A. 2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April 2026 Tahun Anggaran 2026 sudah termasuk semua jenis pajak serta segala jenis pengeluaran PENYEDIA.

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke ke **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG UTAMA DENPASAR (011)** dengan No. Rekening **011 01.11.00228-1** atas nama **PT. MANIK SEKECAP KARYA.**

(4) Apabila adanya *refocussing* anggaran yang mengakibatkan paket pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan, maka PENYEDIA tidak bisa menuntut ganti rugi dan anggaran untuk pembayaran pekerjaan ini sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketersediaan anggaran.

(5) Kontrak didasarkan atas sistem Harga Satuan (*Unit Price*) dan Harga satuan mengikat (*Fixed Unit Price*) seperti tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Pasal 5
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari :
   a. addendum kontrak (apabila ada);
   b. surat perjanjian;
   c. daftar kuantitas dan harga surat penawaran;
   d. syarat-syarat umum kontrak
   e. syarat-syarat khusus kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Kerja),
   f. spesifikasi teknis,
   g. gambar-gambar; dan
   h. dokumen lainnya seperti Surat Keputusan Pemenang, Surat Penunjukan PENYEDIA Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a. Adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
   d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
   e. Surat Penawaran;
   f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   h. Spesifikasi teknis;
   i. Gambar-gambar; dan
   j. Dokumen lainnya seperti Jaminan-jaminan, SPPBJ, B.A. Hasil Pemilihan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemilihan.

(3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Pasal 6
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal

penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, yaitu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 7
DIREKSI PEKERJAAN

(1) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

(2) Direksi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
   a. memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan;
   b. mengingatkan PENYEDIA jasa konstruksi yang berkontrak dengan PPK untuk melaksanakan konstruksi sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dan tertuang dalam dokumen kontrak;
   c. mendukung dan membantu tugas PPK terhadap kegiatan paket pekerjaan; dan
   d. memeriksa kelengkapan administrasi pekerjaan dan membantu kelengkapan administrasi untuk proses pencatatan aset.

(3) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Direksi Pekerjaan bekerja sama dengan Konsultan Pengawas.

Pasal 8
PENGENDALIAN DAN PENANGGUNG JAWAB

(1) Pengendalian atas penyelenggaraan pekerjaan dilakukan oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

(2) PENYEDIA harus menyampaikan secara tertulis Struktur Personil Manajerial untuk diketahui oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

(3) Dalam hal penggantian Struktur Personil Manajerial PENYEDIA wajib mendapat persetujuan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

(4) Untuk keperluan pengendalian pekerjaan PENYEDIA harus membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik harian, mingguan dan bulanan.

(5) Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

(6) Kontrak kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu :
   a. rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 0% - 70% (nol persen sampai tujuh puluh persen) dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan dengan rencana lebih besar 10%;
   b. rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 70% - 100% (tujuh puluh persen sampai seratus persen) dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan dengan rencana lebih besar 5%; dan
   c. rencana fisik pelaksanaan pekerjaan 70% - 100% (tujuh puluh persen sampai seratus persen) dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

Pasal 9
P A J A K

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak - pajak lain dan bea meterai yang berhubungan dalam pekerjaan ini menjadi tanggungan PENYEDIA yang sudah termasuk dalam nilai pekerjaan (KONTRAK) ini.

Pasal 10
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang Muka
   1. PENYEDIA berhak mengambil Uang Muka maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak yaitu **20%** x **Rp. 54.606.548.000,00,00 (Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) = Rp. 10.921.309.600,00 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah** yang dibayarkan dari APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan setelah PENYEDIA menyerahkan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK Surat Jaminan uang muka, yang harus diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah / Jamkrida Provinsi Bali, besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Uang Muka yang diberikan.
   2. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka **224 (dua ratus dua puluh empat)** hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
   3. Uang Muka tersebut diatas dapat diberikan hanya apabila PENYEDIA mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
   4. Pengembalian uang muka akan diperhitungkan berangsur-angsur secara proposional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi fisik 100% (seratus persen) dan/atau sesuai pembayaran termin dan ketersediaan anggaran.
   5. Apabila berlakunya Surat Jaminan Uang Muka tersebut di atas hampir berakhir, sedangkan pengembalian Uang Muka belum habis diperhitungkan, maka PENYEDIA berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya. Apabila perpanjangan masa berlaku Surat Jaminan Uang Muka belum dapat diserahkan oleh PENYEDIA kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berhak mencairkan Jaminan tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada PENYEDIA dan menyetorkan ke Kas Daerah atau memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PENYEDIA oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah uang muka yang telah dibayarkan oleh PENYEDIA;
b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati dengan sistem termin dimana besarnya pembayaran angsuran pertama dan angsuran berikutnya adalah sebesar prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan diterima oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, yang dituangkan di dalam Berita Acara prestasi fisik dengan mengurangkan angsuran pengembalian uang muka, angsuran yang telah dibayarkan, jaminan pemeliharaan (uang retensi) sebesar 5% (lima persen), pengenaan denda (jika ada), dan pajak.

Pembayaran akan dibayarkan melalui APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan/atau mengikuti ketersediaan anggaran; dan

c. Pembayaran untuk pekerjaan dengan prestasi 100% (pekerjaan sudah selesai) dimana serah terima pertama pekerjaan sudah dilaksanakan, maka nilai pekerjaan akan dibayar 100% (seratus persen) dikurangi dengan sisa pengembalian uang muka/pembayaran yang sudah dilakukan pada angsuran sebelumnya pengenaan denda (jika ada) dan penundaan pembayaran sebesar 5 % (lima persen) dari harga kontrak sebagai retensi serta pajak.

Pasal 11
JAMINAN PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PENYEDIA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK yang berupa Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah / Jamkrida Provinsi Bali.
(2) Nilai jaminan pelaksanaan yaitu **5% x Nilai Penawaran Terkoreksi = 5% x Rp. 54.606.548.000 = Rp. 2.730.327.400 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).**
(3) Jaminan pelaksanaan berlaku **224 (dua ratus dua puluh empat)** hari kalender terhitung dari diterbitkannya Kontrak.
(4) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah ditandatanganinya berita acara serah terima pekerjaan penyerahan jaminan pemeliharaan atau retensi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai KONTRAK.
(5) Apabila terjadi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan Pelaksanaan harus diperpanjang sesuai dengan perpanjangan waktu pelaksanaan/pemberian kesempatan.
(6) Apabila PENYEDIA tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PENYEDIA dianggap tidak mampu dan permintaan perpanjangan waktu tidak dapat disetujui oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

Pasal 12
JAMINAN PEMELIHARAAN

(1) Jaminan Pemeliharaan Wajib diberikan oleh PENYEDIA setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100 % (seratus persen).
(2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak harus diberikan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang telah diserahkan.
(3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
(4) Apabila pelaksanaan pekerjaan sudah mencapai 100 % (seratus persen) maka untuk mencairkan retensi diperlukan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah / Jamkrida Provinsi Bali.
(5) Apabila masa pemeliharaan melewati tahun anggaran, PENYEDIA belum menyerahkan jaminan pemeliharaan pada akhir tahun anggaran maka retensi sebesar 5% (lima persen) akan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Provinsi Bali.

Pasal 13
PENYERAHAN PERTAMA DAN KEDUA

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) PENYEDIA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK untuk penyerahan hasil pekerjaan.
(2) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENYEDIA, bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan PENYEDIA wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
(3) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
(4) PENYEDIA wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
(5) Setelah masa pemeliharaan berakhir, PENYEDIA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK untuk melakukan Serah Terima Kedua Hasil Pekerjaan.
(6) PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah PENYEDIA melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan apabila jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank.
(7) Apabila masa pemeliharaan melampaui tahun anggaran, maka PENYEDIA dapat memperoleh uang retensi dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.
(8) Apabila PENYEDIA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berhak menggunakan uang jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.

Pasal 14
ASURANSI

(1) PENYEDIA harus mengasuransikan semua barang dan peralatan-peralatan yang dipakai, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
(2) Mengenai besarnya asuransi tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
PEKERJAAN TAMBAH/KURANG

(1) Pekerjaan tambah/kurang dianggap sah bila ada perintah PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK secara tertulis.
(2) Penentuan harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan tambah, didasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam perincian harga penawaran dan harga satuan OE dan apabila tidak ada, akan ditetapkan bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atau persetujuan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK secara tertulis.
(4) Apabila ada pekerjaan tambah, yang mengakibatkan bertambahnya nilai kontrak dan perubahan waktu pelaksanaan, maka PENYEDIA wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan tambahan untuk Jaminan Pelaksanaan minimun sebesar 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan tambah.

Pasal 16
PERALATAN, BAHAN DAN TENAGA KERJA

(1) Semua peralatan dan bahan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini disediakan oleh PENYEDIA.
(2) PENYEDIA berkewajiban mengutamakan penggunaan peralatan/bahan produksi dalam negeri yang telah memenuhi standar yang telah ditentukan, dan menentukan sendiri besarnya kandungan lokal peralatan dan bahan yang digunakan.
(3) PENYEDIA berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang diperlukan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    a. PENYEDIA diwajibkan mencegah bahaya yang mungkin timbul atas diri pekerja dalam melaksanakan pekerjaan, dan jika terjadi kecelakaan, PENYEDIA diwajibkan dengan segera memberi pertolongan kepada korban dan segala biaya yang diperlukan menjadi tanggung jawab PENYEDIA;
    b. PENYEDIA berkewajiban menyediakan obat-obatan yang cukup untuk pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
    c. PENYEDIA diwajibkan menyediakan barak kerja yang memenuhi persyaratan kesehatan, ketertiban serta persediaan air yang cukup.

Pasal 17
SANKSI-SANKSI

Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain meliputi : bahan, peralatan, personil yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi, maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK akan mengenakan sanksi-sanksi kepada PENYEDIA sebagai berikut :
    a. memberikan teguran-teguran dan peringatan-peringatan;
    b. menangguhkan pembayaran;
    c. tidak membayar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan Pemberi Tugas;
    d. Pembongkaran/penggantian;
    e. Mengenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk tiap hari keterlambatan dari Harga Kontrak;
    f. Pemutusan Perjanjian Kerja/Kontrak;
    g. Memasukkan kedalam Daftar Hitam Rekanan;
    h. Jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bali apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak pada masa keterlambatan ini; dan
    i. Pada masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi, apabila PENYEDIA tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK berhak untuk tidak membayar retensi atau

mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta PENYEDIA dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Pasal 18
PEMUTUSAN KONTRAK

(1) Apabila PENYEDIA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Perjanjian ini dan telah mendapat 2 (dua) kali peringatan secara lisan dan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, maka PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berhak secara sepihak memutuskan kontrak. Dalam hal ini Jaminan Pelaksanaan dan sisa jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah dan kepada PENYEDIA akan dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan.
(2) Apabila PENYEDIA secara sepihak memutuskan kontrak tanpa alasan yang dapat diterima PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, maka Jaminan Pelaksanaan dan sisa jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah dan kepada PENYEDIA akan dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan.

Pasal 19
KESELAMATAN DAN KEAMANAN KERJA

(1) PENYEDIA bertanggungjawab atas keselamatan kerja pada semua kegiatan di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan dan pemeliharaan pekerjaan :
   a. memberi perhatian penuh atas keselamatan semua orang yang ditugaskan di lapangan serta menjaga keadaan lapangan dan pekerjaan sebagaimana mestinya sehingga bahaya bagi orang-orang tersebut dapat dihindari;
   b. menyediakan dan memelihara semua penerangan, penjagaan, pemagaran, tanda hati-hati pada waktu dan dimana diperlukan atau diminta oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK atau oleh petugas yang berwewenang untuk melindungi pekerjaan atau untuk keselamatan dan kenyamanan umum;
   c. melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup.

(2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tapi tidak terbatas pada :
   a. PENYEDIAan fasilitas sanitasi untuk pencegahan pencemaran biologi atau pabrik pada lapangan atau lapisan air, saluran, sumur, tangki penampungan atau PENYEDIAan air;
   b. menghindari pengerusakan/pembinasaan tumbuhan dan binatang;
   c. menghindari terjadinya gas/asap buangan dari plant yang merugikan atau berlebihan, serta dari kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan; dan
   d. menghindari pengerusakan/gangguan pada lapisan air, saluran, sumur, tangki penampungan/PENYEDIAan air.

(3) Apabila PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK berpendapat bahwa tindakan - tindakan pencegahan yang telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan ini tidak memadai, maka PENYEDIA harus melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut sesuai petunjuk yang wajar dari PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK.

(4) PENYEDIA harus membebaskan PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dari tanggung jawab atas kerugian akibat kebisingan dan gangguan-gangguan yang timbul selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan dari tuntutan ganti rugi yang disebabkan atau berhubungan dari tanggung jawab tersebut.
(5) PENYEDIA harus melakukan penanganan terkait Pencegahan Penularan penyakit menular. Biaya Penyelenggaraan Pencegahan Penularan penyakit menular dibebankan kepada PENYEDIA.
(6) Mekanisme tentang Protokol Pencegahan Penularan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
   a. Menyediakan fasilitas Pencegahan Penularan penyakit menular yang dilakukan oleh PENYEDIA:
      1. PENYEDIA wajib menyediakan fasilitas tambahan dan melaksanakan tes secara berkala untuk Pencegahan Penularan penyakit menular di kantor dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu;
      2. PENYEDIAan fasilitas tambahan untuk Pencegahan Penularan penyakit menular diantaranya adalah:
         - Masker wajah;
         - Cairan desinfektan;
         - Alat semprot desinfektan manual;
         - Sabun;
         - *Hand Sanitizer;*
         - Tisu;
         - Tempat cuci tangan;
         - Wastafel;
         - Sosialisasi;
         - Pengukur suhu;
         - dll
   b. Petugas K3 wajib mengedukasi semua orang untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga diri dari penularan penyakit menular.

Pasal 20
ADDENDUM

(1) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian (KONTRAK) yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi :
   a. Perubahan pekerjaan;
   b. Perubahan harga Kontrak;
   c. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan;
   d. Perubahan personil manajerial dan/atau peralatan utama; dan
   e. Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah Administrasi.
(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Surat Perjanjian (KONTRAK) diatur sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Perubahan ketentuan Surat Perjanjian (KONTRAK) dituangkan dalam Addendum Surat Perjanjian (KONTRAK) yang setingkat dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) induknya.

Pasal 21
JAMINAN KONSTRUKSI

(1) PENYEDIA harus menjamin hasil pekerjaannya selama kurun waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung dari selesainya masa pemeliharaan (FHO), bahwa pekerjaan tersebut dari segi teknis masih dianggap baik.

(2) Dalam hal ini terjadinya kerusakan terhadap hasil pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yang diakibatkan kelalaian oleh PENYEDIA yang di tentukan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LPSLKPP RI), maka PENYEDIA wajib memperbaikinya tanpa meminta biaya tambahan.

Pasal 22
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
(2) Yang digolongkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. Bencana alam;
    b. Bencana non alam;
    c. Bencana sosial;
    d. Pemogokan;
    e. Kebakaran;
    f. Kondisi cuaca ekstrim; dan
    g. Gangguan industri lainnya.
(3) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), maka PENYEDIA wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar.
(4) Untuk keperluan perhitungan atas kerugian yang mungkin terjadi, PENYEDIA perlu segera mengambil tindakan/langkah pengumpulan data mengenai pekerjaan dengan mengambil dokumentasi/foto dan wajib melaporkan kepada Direksi Pekerjaan secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa diikuti laporan terperinci secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
(5) Apabila PENYEDIA lalai melaporkan secara tertulis, sehingga melampaui batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PENYEDIA kehilangan haknya untuk mengajukan *claim* atas kejadian tersebut.

Pasal 23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kontrak ini, maka PARA PIHAK mengutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.
(2) Jika perselisihan PARA PIHAK mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dapat melalui **Layanan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LPSLKPP RI).**
(3) Selama proses penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

1

Pasal 24
D O M I S I L I

PARA PIHAK yang terkait dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) ini sepakat memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 25
KEWAJIBAN TERHADAP PEMERIKSAAN

(1) Hasil pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kontrak, bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan oleh pihak internal maupun eksternal ditemukan kekurangan Kualitas maupun Kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang berakibat merugikan Negara, maka PENYEDIA jasa wajib bertanggung jawab secara hukum dan mengembalikan Kerugian Negara tersebut, apabila tidak bersedia mengembalikan akan dimasukan dalam daftar hitam, dan menanggung sanksi hukum terhadap kelalaian tersebut.
(2) Terhadap seluruh keluhan pengaduan dan laporan Masyarakat/Wartawan/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atas pelaksanaan pekerjaan selama masa kontrak yang kerusakannya karena kelalaian pelaksanaan menjadi tanggung jawab PENYEDIA untuk menyelesaikannya.

Pasal 26
LAPORAN DAN DOKUMENTASI

(1) PENYEDIA wajib membuat laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
(2) PENYEDIA wajib membuat foto-foto pelaksanaan pekerjaan yang merupakan dokumen yang memperlihatkan kegiatan-kegiatan, yaitu situasi dan kondisi sebelum, sedang dan sesudah dikerjakan, sehingga dapat menunjukkan gambaran nyata dari sebagian kegiatan maupun keseluruhan pelaksanaan pekerjaan.
(3) Untuk dapat menunjukkan perbedaan lapangan dari ketiga fase tersebut maka cara memotretnya harus dari lokasi yang sama.
(4) Foto pekerjaan tersebut harus dibuat rangkap 6 (enam) lengkap dengan albumnya dan diserahkan kepada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK sebelum Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 27
KETENTUAN PENUTUP

(1) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (KONTRAK) ini oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, merupakan kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA
PT. MANIK SEKECAP KARYA



Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Direktur

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, S.T., M.T.
NIP. 19800806 201101 1 004

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA PT. MANIK SEKECAP KARYA	**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM Direktur	**I Made Mahardika, S.T., M.T.** NIP. 19800806 201101 1 004

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA PT. MANIK SEKECAP KARYA	**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
	
Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM Direktur	**I Made Mahardika, S.T., M.T.** NIP. 19800806 201101 1 004

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA
PT. MANIK SEKECAP KARYA

Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Direktur

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

METERAI TEMPEL
2ED0FANX371998937

I Made Mahardika, S.T., M.T.
NIP. 19800806 201101 1 004

(2) Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen-dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan PENYEDIA yang meliputi semua dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(3) Surat Perjanjian (KONTRAK) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PENYEDIA
PT. MANIK SEKECAP KARYA

Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
Direktur

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika, S.T., M.T.
NIP. 19800806 201101 1 004

Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Selasa / 08 April 2026
Acara : Rapat Penandatanganan Kontrak
Tempat : R.R. Utama DPUPRKIM Prov. Bali

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
1	I Wusakti Yasa Wedha	Kadis PUPRKIM		
2	I Putu Tisnayasa	KABID CK DISPUPRKIM		
3	Gede Yudhi Asmara	Kasi PBL	081338966662	
4	I Made Maharditya.	DPUPRKIM	0857861088666	
5	IBK INDRA K	PT. TJS		
6	Suipta Ari	PT. TJS		
7	Intan Cahya Dewi	PT. TJS	085739359760	
8	I. Wayan Mandara	PT PJ	081337324991	
9	I Wayan Parsika Utama	DISPUPRPERKIM	081999691231	

Daftar Hadir

Hari/Tanggal :

Acara :

Tempat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
10	MD. AGASTYA KERTANUGRAHA	DPRPA KIM		
11	Kadek Risda Indah Natasya	Penyedia PT. MSK		
12	Yeni Marta Sari	PT. MSK		
13	A. SUKARDI	PTTJS		
14	I. D DUDI	BINAGON		
15	Bunga Widya	Jamkrida Bali		
16	ADI JUNIARTA	PT. TJS		
17	A A Paramita	PT. TJS		
18	I.GST. AG. Adi Meginarda	PT. TJS		

Daftar Hadir

Hari/Tanggal :

Acara :

Tempat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
19	Aya Dwi Yanti	Staf Notaris Putu Heri Hardawan S.H, M.Kn		
20	Slamet Priyadi	PT. Aneka Tata Sarana.		
21	IDA SULINDRI	CV. CDD		
22	Tika	Admin BBW		
23	Hilirya Sudirya	BBW		
24	Dwi Eka	TJS		
25	I Gd Diatmika	TJS		
26	Imada Suarsana	TJS		
27	Ni Ketut Ayu Alit Ganyani	TJS		

Daftar Hadir

Hari/Tanggal :

Acara :

Tempat :

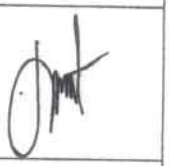
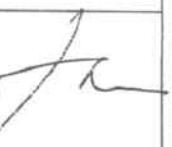
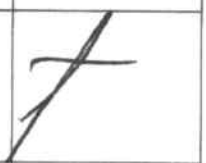
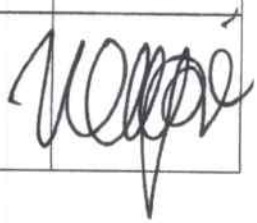
NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
28	Nyoman Kariana	Konsultan	087850073336	
29	I. Nyh Sudiarta	Konsultan CV BBW	082247418866	
30	IDS BAGUS PUTRA	Konsultan BBW	082147874588	
31	I Nyh J. Swantara	Konsultan BBW	085847005463	
32	I Gede Sastradi	BBW	081337554534	
33	INym Gd Rujana	BBW / Bir	08137981 2	
34	I G. Lanang G.	Htpw / Aud.	081999058189	
35	IW Gd Angga Putra	Auditor / Htpw		
36	Ayu Gita Novianti	Htprov / Auditor	081385989930	

Daftar Hadir

Hari/Tanggal :

Acara :

Tempat :

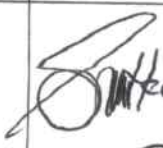
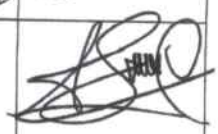
NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
37	I Made Budi Atmika	Dirut TJS		
38	Miskayasa	TJS		
39	Dwi Antara	TJS		
40	Putu Rasaga	TJS		
41	I Dewa Gd. Arimbawa.	Konsultan pengawas		
42	Made Purna A	CV. eco.		
43	Ayu Ariesta	Tim Teknis		
44	Dian Utami	Tim Teknis		
45	D. A. R. Ulupie	—u—		

Daftar Hadir

Hari/Tanggal :

Acara :

Tempat :

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
46	Ni Ketut Santika Dewi	Tim Teknis		
47.	MD. AGASTYA KERTANUGRAHA	TIM TEKNIS		
48	Parsika Utami			
49	Adhi Rahani P.			
50	Edi Marganbara.			

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 27 April 2026

Yth. Inspektur Daerah Provinsi Bali
di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.25.600.1.15.2/4986/CK/DISPUPR.PERKIM

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Undangan Rapat Penandatanganan Kontrak dan Serah Terima Personil	1 (satu) lampiran	Bersama ini dimohon untuk berkenan hadir dalam kegiatan rapat tersebut. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Nusakti Yasa Wedha, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671001 199703 1 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 27 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/4986/CK/DISPUPR.PERKIM
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : **Undangan Penandatanganan Kontrak**

Yth. (terlampir)
di _
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan:

1. Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Kahyangan Jagat Lainnya dan Huluning Pura)
2. Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa)
3. Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Eswarya)
4. Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)
5. Pengawasan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem Tahap II

Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2026
Waktu : 11.00 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Cipta, DPUPRKIM Provinsi Bali
Agenda : **Rapat Penandatanganan Kontrak dan Serah Terima Personil**

Demikian disampaikan mohon arahan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, ST., MT
NIP. 19800806 201101 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. dst.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B.25.600.1.15.2/4986/CK/DISPUPR.PERKIM
Tanggal : 27 April 2026

Undangan disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
4. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
5. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali;
6. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Kahyangan Jagat Lainnya dan Huluning Pura);
7. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa);
8. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala);
9. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Eswarya);
10. Tim Teknis pada Pekerjaan Pengawasan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem Tahap II;
11. Direktur PT. TUNAS JAYA SANUR selaku Penyedia untuk Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Kahyangan Jagat Lainnya dan Huluning Pura);
12. Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA selaku Penyedia untuk Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Lawa) dan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala);
13. Kuasa KSO PT. ANEKA TATA SARANA – PT. EKA MAKMUR BERSAMA – CV. CATUR DHARMA DIATI selaku Penyedia untuk Pekerjaan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Eswarya);
14. Direktur CV. BINA BWANA WISESA selaku Penyedia untuk Pekerjaan Pengawasan Penataan Area Parahyangan Di Kawasan Suci Besakih Di Kabupaten Karangasem Tahap II.

Catatan:
Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, peserta rapat wajib membawa tumbler secara mandiri untuk kebutuhan minum.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) UNTUK PAKET PEKERJAAN PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)
Nomor : B.25.600.1.15.2/4771/CK/DISPUPR.PERKIM

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua puluh empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **I Made Mahardika, S.T., M.T.**
   Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
   Selanjutnya disebut **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

2. Nama : **Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM**
   Perusahaan : PT. MANIK SEKECAP KARYA
   Jabatan : Direktur

   Merupakan pemenang hasil tender Paket Pekerjaan **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)**, Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dan **PENYEDIA** telah melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan hasil sebagai berikut :

1. Dari hasil rapat, telah disepakati bahwa harga yang akan dipergunakan dalam dokumen kontrak Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala) adalah sebesar **Rp. 54.606.548.000,00 (Lima puluh empat miliar enam ratus enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);**
2. Jangka Waktu Pelaksanaan ditetapkan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal yang tertuang didalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
3. Kontrak dibayarkan dengan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati dengan sistem termin dimana besarnya pembayaran angsuran pertama dan angsuran berikutnya adalah sebesar prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan dan diterima baik oleh PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK, yang dituangkan di dalam Berita Acara prestasi fisik dengan mengurangkan angsuran pengembalian uang muka,

angsuran yang telah dibayarkan, jaminan pemeliharaan (uang retensi) sebesar 5% (lima perseratus), pengenaan denda (jika ada), dan pajak, dan/atau mengikuti ketersediaan anggaran;

4. Setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda 1 $^{0}/_{000}$ (satu per seribu) dari nilai kontrak;
5. Dalam hal terjadi perubahan/addendum SPMK maka Berita Acara ini mengikuti perubahan/addendum SPK dimaksud; dan
6. Melanjutkan proses penandatanganan kontrak antara PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK dengan PENYEDIA JASA.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA PT. MANIK SEKECAP KARYA	**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM Direktur	**I Made Mahardika, S.T., M.T.** NIP. 19800806 201101 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, (sebagai laporan);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, (sebagai laporan);
3. Arsip.

Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jum'at / 24 April 2026
Acara : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)
Tempat : Ruang Rapat Utama DISPUPRKIM Prov Bali

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
1	Gede Yudhi Asmara, ST. M.Si	Kasi PBL		
2	I Made Mahardika, ST., MT	PPK		
3	Edy Indrawan	B.PBJEK / Ksb Strategi	081329662279	
4	Kadek Risda Indah Natasya	Direktur PT. Manik Sekecap Karya	081297500804	
5	A A N Ketut Pertha	BPKAD/Kasubb. PE	082145859197	
6	I Made Miara	PPUPD/Inspektur	085738495574	
7	I Gede Agus Gein A. P.	Itprov / PPUPD Ahli Pertama	085156103739	
8	Yesi Marta Sari	PT. Manik Sekecap Karya	085702406052	
9	I GST NGR PUSUMA U	B. PBJEK / KABAK PZL	085135977695	

Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jumat / 24 April 2026
Acara : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Penataan Area Pelayanan di Kawasan Suci Besakih di Kab. Karangasem (Pura Catur Loka Pala)
Tempat : R. Rapat Utama DISPUPRKIM Provinsi Bali

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
10	I GEDE JAYA	Manik Sekecap	081339583031	
11	I Made Wedrayana	manik sekecap	081338078139	
12	I. B BUDI			
13	I Md Wahyu Wiranata	JF PJK	085790945961	
14	I GEDE Rustiawan	TIM ARSITEK	081338398700	
15	I Made Juliarta	Manik Sekecap		
16	Komang Ita Mandusari	PT. Manik Sekecap		
17	A. A. Gede Aditya Septyana	PT. MSK		
18	Md. Agastya Kertanugraha, ST	Tim Teknis		

Daftar Hadir

Hari/Tanggal : Jumat /24 April 2026
Acara : Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)
Tempat : Ruang Rapat Utama DISPUPRKIM Prov. Bali

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	TELP	TTD
1	Dewa A R. Ulupie M	DISPUPRKIM BALI	082236626295	

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 22 April 2026

Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala BPKAD Provinsi Bali;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
di
Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR : B.25.600.1.15.2/4854/CK/DISPUPR.PERKIM

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)	1 (satu) Gabung	Bersama ini dimohon untuk berkenan hadir dalam kegiatan rapat tersebut. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Nusakti Yasa Wedha, ST., MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671001 199703 1 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 22 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/4770/CK/DISPUPR.PERKIM
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan Persiapan Penandatanganan Kontrak**

Kepada Yth.
(terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala), Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 24 April 2026
Waktu : 09.00 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Cipta, DPUPRKIM Provinsi Bali
Agenda : **Rapat Pembahasan Persiapan Penandatanganan Kontrak**

Demikian disampaikan mohon arahan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, ST., MT
NIP.19800806 201101 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. Arsip.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Lampiran Surat Undangan

Nomor : B.25.600.1.15.2/4770/CK/DISPUPR.PERKIM
Tanggal : 22 April 2026

Undangan disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali;
2. Kepala BPKAD Provinsi Bali;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
4. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
5. Kepala Bidang Cipta Karya, DPUPRKIM Provinsi Bali;
6. Kepala Bidang Bina Konstruksi, DPUPRKIM Provinsi Bali;
7. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya, DPUPRKIM Provinsi Bali;
8. Tim Teknis pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala);
9. Tim Administrasi pada Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala);
10. Direktur PT. MANIK SEKECAP KARYA selaku Penyedia Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala), (ikut serta menghadirkan seluruh personil manajerial).

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI
NOMOR : B.25.600.1.15.2/4769/CK/DISPUPR.PERKIM

TENTANG

SURAT PENUNJUKKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ)
UNTUK PAKET PEKERJAAN PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor: B.38.000.3.3/18750/P08.P2P/B.PBJEK, tanggal 20 April 2026, Hal: Pemberitahuan Hasil Pemilihan, Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih Kabupaten di Karangasem (Pura Catur Loka Pala) pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
b. bahwa pengadaan melalui Tender sebagaimana dimaksud huruf a, sudah selesai dilaksanakan yang dimenangkan oleh PT. MANIK SEKECAP KARYA beralamat di Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor: 182/SE/DK/2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64;
12. Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun

2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi;

16. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 114/KPTS/Dk/ 2024 Tentang Penetapan Jabatan Kerja Dan Jenjang Kualifikasi Atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;
19. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026;
20. Standar Nasional Indonesia 1726:2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan NonGedung sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 1726:2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung;
21. Peraturan umum Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan (PUPBNI-3/56);
22. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI1971);
23. Peraturan Umum Bahan Nasional (PUBI982);
24. Peraturan Perburuhan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
25. Peraturan-peraturan di Indonesia (Tentang Pengarahan Tenaga Kerja);
26. SKSNIT-15-1991-03 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung;
27. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali No. DPPA/A. 2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2026 tanggal 14 April 2026 Tahun Anggaran 2026;
28. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Nomor: B.25.100.3/125/SEKRET/DISPUPR.PERKIM, tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Perusahaan :

Nama : **PT. MANIK SEKECAP KARYA**
NPWP : 0936110808901000
Alamat : Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali.
Harga : Rp. 54.606.548.000,00
(Lima puluh empat miliar enam ratus enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

sebagai Pemenang Paket Pekerjaan PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH KABUPATEN DI KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA).

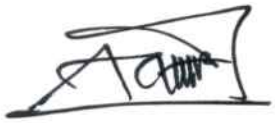
KEDUA : Segala yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Besarnya Nilai Jaminan Pelaksanaan yaitu :
5% x Nilai Penawaran Terkoreksi = 5% x Rp. 54.606.548.000 = Rp. 2.730.327.400 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
Jangka waktu jaminan pelaksanaan 224 (dua ratus dua puluh empat) hari terhitung dari diterbitkannya SPMK.

KEEMPAT : Pekerjaan harus dimulai bersamaan dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 22 April 2026

Bali, 22 April 2026
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika S.T., M.T.
NIP. 19800806 201101 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Povinsi Bali selaku Pengguna Anggaran, (sebagai laporan);
2. PPTK pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, (sebagai laporan);
3. Kepala Seksi Penata Bangunan dan Lingkungan, (sebagai laporan);
4. Arsip

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

REVIU HASIL PEMILIHAN

PAKET PEKERJAAN PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

Nomor : B.25.600.1.15.2/4768/CK/DISPUPR.PERKIM

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: **I Made Mahardika, ST., MT.**
NIP	: 19800806 201101 1 004
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

Melaksanakan reviu dokumen Hasil Pemilihan Nomor: B.38.000.3.3/18750/P08.P2P/B.PBJEK Tanggal 20 April 2026 dengan hasil sebagai berikut :

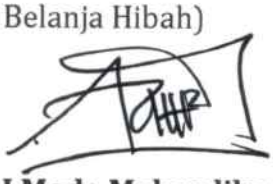
1. Proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada angka 7.2 Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka untuk paket pengadaan dimaksud, apabila sepakat dengan hasil pemilihan pokja dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Kontrak.

2. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia (PT. MANIK SEKECAP KARYA) memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu (terlampir), kami menerima Hasil Pemilihan dan akan melanjutkan proses SPPBJ dan Kontrak.

Demikian *Reviu* Hasil Pemilihan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)



I Made Mahardika, ST., MT.
NIP.19800806 201101 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN *REVIU* HASIL PEMILIHAN
PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH
DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)
Nomor : B.25.600.1.15.2/4768/CK/DISPUPR.PERKIM

A. EVALUASI DOKUMEN

1. Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	-
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	-

2. Evaluasi Administrasi

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	-
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	-

3. Evaluasi Teknis

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	-
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	-

4. Evaluasi Harga/Biaya

No	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	Rp. 55.760.228.826,95	Rp. 55.760.228.826,95	LULUS	-
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	Rp. 54.606.548.000,00	Rp. 54.606.548.000,00	LULUS	-

Nilai Total HPS : Rp. 57.480.577.157,54
(Lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma lima puluh empat sen)

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JALAN BELITON NOMOR 2 DENPASAR – (80112), TELEPON (0361) 222883,
Laman : dispuprkim.baliprov.go.id, Pos-el : puprkim@baliprov.go.id

Bali, 21 April 2026

Nomor : B.25.600.1.15.2/4767/CK/DISPUPR.PERKIM
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Undangan *Reviu* Hasil Pemilihan

Kepada Yth.
Tim Teknis Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)

di –
tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Pekerjaan Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala), Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, pada Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali sesuai dengan DPPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, bersama ini dimohon kehadirannya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 April 2026
Waktu : 08.00 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Cipta Karya, DPUPRKIM Provinsi Bali
Agenda : Rapat *Reviu* Hasil Pemilihan

Demikian disampaikan mohon arahan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
(Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)

I Made Mahardika, S.T., M.T.
NIP.19800806 201101 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth:
1. Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali, selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan);
2. Arsip.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 20 April 2026

Nomor : B.38.000.3.3/18750/P08.P2P/B.PBJEK
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : **Pemberitahuan Hasil Pemilihan**

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
di
Denpasar

Berdasarkan permohonan Proses Tender pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan kode tender: **10113020000** yang telah diunggah/diupload oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah) bersama ini disampaikan hasil penetapan pemenang pemilihan penyedia untuk pekerjaan **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)** dengan kode RUP 63289140, oleh Pokja Pemilihan 08 sesuai surat nomor: B.38.000.3.3/18694/P08.P2P/B.PBJEK tanggal 20 April 2026 perihal Pemberitahuan Hasil Pemilihan (terlampir), untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Selanjutnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024, pada angka 5.2 Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka untuk paket pengadaan dimaksud sudah dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat yang berwenang (PPK).

Untuk menegakan Integritas, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada perorangan maupun lembaga. Apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai kami saat menerima layanan, agar melaporkan dengan dilengkapi bukti autentik melalui www.lapor.go.id.

Demikian disampaikan untuk perhatian dan tindak lanjut. Terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. Sekretaris Daerah,
Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian

I Made Budi Adiana, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790803 199903 1 005

Tembusan:
Inspektur Daerah Provinsi Bali

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 20 April 2026

Nomor : B.38.000.3.3/18694/P08.P2P/B.PBJEK
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : **Pemberitahuan Hasil Pemilihan**

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Sub Kegiatan 1.03.09.1.01.0019;5.1.05 Belanja Hibah)
di
Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya proses pemilihan penyedia melalui Tender untuk Pekerjaan **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala) (Kode Tender 10113020000)** melalui SPSE 4.5, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil proses Seleksi yang telah dilakukan dan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan 08 pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali pada paket **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala) (Kode Tender 10113020000)** (Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor: Nomor : B.38.000.3.3/17652/P08.P2P/B.PBJEK tanggal 14 April 2026 (terlampir);
2. Selanjutnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024, pada angka 5.2 Penetapan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka untuk paket pengadaan dimaksud sudah dapat dilanjutkan dengan penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat yang berwenang (PPK).

Demikian disampaikan untuk perhatian dan tindak lanjut. Terimakasih.

Pokja Pemilihan 08
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Ketua,

Glodius Mathias Sandi Toendan, S.STP., MA
NIP.19870422 200602 1 001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

Bali, 20 April 2026

Nomor : B.38.000.3.3/18691/P08.P2P/B.PBJEK
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : **Laporan Hasil Pemilihan**

Yth. Kepala Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

Di

Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya proses pemilihan penyedia melalui Tender untuk Pekerjaan **Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)** kode tender: **10113020000** melalui SPSE 4.5, bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil Tender :

1. Pagu Anggaran : Rp. 57.480.628.000,00
2. Nilai HPS : Rp. 57.480.577.157,54
3. Pemenang
   - Nama : **PT. MANIK SEKECAP KARYA**
   - Direktur Utama : Kadek Risda Indah Natasya, SM., MM
   - Alamat : Jl. Blumbungan, Br. Parekan, Kel. Sibang Gede, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali
   - NPWP : 0936 1108 0890 1000
   - Telepon : 081297500804
   - Email : ptmaniksekecapkarya@gmail.com
   - Nilai Penawaran : Rp. 54.606.548.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) (94,99%)
4. Pemenang Cadangan 1
   - Nama : **PT. TUNAS JAYA SANUR**
   - Direktur Utama : I Made Budi Atmika, ST
   - Alamat : Jl. By Pass Ngurah Rai, No. 21, Desa/Kelurahan Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali
   - NPWP : 01.112.098.7-904.000

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.

- Telepon : 081338796526
- Email : pttjs@pttjs.com
- Nilai Penawaran : Rp. 55.760.228.826,95 (Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Koma Sembilan Puluh Lima Sen).(97,01%)

b. Data Proses Pemilihan:

1. Peserta yang mendaftar : 60 (enam puluh) peserta
2. Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran : 2 (dua) peserta
3. Peserta yang memenuhi persyaratan : 2 (dua) peserta

c. Jenis Pekerjaan : Jasa Konstruksi

Bersama ini pula terlampir kami sampaikan seluruh rekaman dokumen proses Pemilihan pekerjaan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan dalam proses lebih lanjut. Terimakasih.

Pokja Pemilihan 08
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Ketua,

Glodius Mathias Sandi Toendan, S.STP., MA
NIP.19870422 200602 1 001

Tembusan:
1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
2. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Berita Acara Evaluasi Penawaran

PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

Nomor : B.38.000.3.3/16788/P08.P2P/B.PBJEK

Pada hari ini, 8 April 2026, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10113020000
Nama Tender	:	Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)
Nilai Total HPS	:	Rp. 57.480.577.157,54
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 60 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. MANIK SEKECAP KARYA	Rp. 54.606.548.000,00
2	PT. TUNAS JAYA SANUR	Rp. 55.760.228.826,95
3	CV.INTI KARYA DESAIN	
4	PT. MEGA MESARI GROUP	
5	CV. DWI TUNGGAL JAYA	
6	PT. MELANGIT JAYA MANDIRI	
7	cv. mulia karya utama	
8	CV.MURJAYADI UTAMA	
9	CV.DWITYA PARAMITHA	
10	CV. ARCHIVIL ENGINEERING	
11	PT. ELANG BHUMI PERSADA	
12	PT. SINARBALI BINAKARYA	
13	CV. AL LI SA KONSTRUKSI	
14	PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	
15	PT Geo Indogreen Karya	
16	PT DUTA MAS INDAH	
17	CV. PERMAI	
18	CV. WIRA PRATAMA TEKNIK	
19	PT. DEWATA BALI ELEKTRIK	

RANCANG MEGAH SEJAHTERA

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.

BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

21	CV PERAMA DEWATA
22	GLEDEK ARTHA BALADIKA
23	PT. POLA MITRA JAYA
24	PT Waskita Beton Precast, Tbk
25	PT. AQUIFER BUANA UTAMA
26	PT. GUNAKARYA NUSANTARA
27	CV. GEMILANG SENTOSA
28	CV. KRISYA JAYA UTAMA
29	CV. KARMA YUDHA
30	ADI GANDHA LARAS JAYA
31	PT. PULU GANDING SEJAHTERA
32	PT.PUTRA KUBU KONSTRUKSI
33	PT. MEGA SAKINA RAYA
34	PT. AMORAINDO UTAMA KARYA
35	PT. Setvi Tunas Utama
36	PT. GALA TAMA
37	CV. Catur Dharma Diati
38	CV.GLOBAL PRESISI
39	PT SINAR KERTANEGARA
40	PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA
41	CV. MANDAWE
42	PT. PASKINDO DJAYA
43	CV MEGAH KARYATAMA
44	cv. battar
45	PT. TUNAS JAYA NUSANTARA
46	CV JAWARA KONSTRUKSI INDONESIA
47	CV. GEBINA NAFRINA MANDIRI
48	PT. Urban Ritel Internasional
49	CV. KARYA SURYA PRATAMA
50	PT. CANDI BENTAR KARYA
51	CV. MIRUEK TAMAN
52	WANGUN AMERTHA JAYA
53	CV.Ratu Gede
54	PT. GINA KARYA UTAMA
	KRESNA PUTRA KARYA

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

56	CV. Dian Artha Utama	
57	CV. PRIMA KONSTRUKSI	
58	PT. Sinar Emas Samudra	
59	CV. Amartya Jaya	
60	PT SURYA BALI KONSTRUKSI	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	Rp. 55.760.228.826,95	Rp. 55.760.228.826,95	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	Rp. 54.606.548.000,00	Rp. 54.606.548.000,00	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Bali

ttd,

08

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rahmat Denpasar - Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropbjek.baliprov.go.id, Pos-el : biropbj@baliprov.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI PENETAPAN PEMENANG

Nomor : B.38.000.3.3/17544/P08.P2P/B.PBJEK

Kode Tender	:	10015106000
Nama Paket	:	Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)
Lokasi Kegiatan	:	Kabupaten Karangasem
Nilai Total HPS	:	Rp. 57.480.577.157,54 termasuk PPN 11%
Sumber Dana	:	APBD Provinsi Bali
Tahun Anggaran	:	2026
Pagu Anggaran	:	Rp. 57.480.628.000,00
Unit Kerja	:	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jangka Waktu Pelaksanaan	:	210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Metode Pengadaan	:	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini Pokja Pemilihan 08 pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.38.000.3/62772/P2P/B.PBJEK Tanggal 16 Desember 2025, melakukan Klarifikasi Penetapan Pemenang terhadap **PT. MANIK SEKECAP KARYA** untuk pekerjaan tersebut di atas, sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
3. Dokumen Pemilihan nomor: B.38.000.3.3/10466/P08.P2P/B.PBJEK, tanggal 3 Maret 2026, beserta Addendum;
4. Dokumen Penawaran **PT. MANIK SEKECAP KARYA**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

C. MEKANISME DAN PROSEDUR KLARIFIKASI

1. Pokja Pemilihan 08 melakukan klarifikasi penetapan pemenang secara offline terhadap **PT. MANIK SEKECAP KARYA;**
2. Berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 34.3:
   Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP).
3. Berdasarkan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 34.4:
   Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:
   a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
   b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
   c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat:
      1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (*overlap*);
      2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat;
      3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau
      4) kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;
   d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
   e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;
   f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat:
      1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/*General Superintendent (GS)* dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.

4. Pokja tidak melayani hal-hal yang di luar mekanisme dan ketentuan dalam *dokumen ini;*
5. Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.

C. HASIL KLARIFIKASI

1. Pertanyaan:
   Sebagai perwakilan dari **PT. MANIK SEKECAP KARYA** yang akan diklarifikasi, agar Saudara menyampaikan identitas diri (fotocopy ID). Saat ini Saudara diklarifikasi sehubungan dengan penawaran Saudara terhadap paket pekerjaan tersebut di atas. Sebagai direktur/perwakilan dari **PT. MANIK SEKECAP KARYA** yang akan diklarifikasi, apakah Saudara sanggup untuk diklarifikasi terkait hal tersebut?

   Jawaban:

   iya saya sanggup untuk diklarifikasi

2. Pertanyaan:
   Mohon sebutkan identitas dan jabatan Saudara pada **PT. MANIK SEKECAP KARYA**!

   Jawaban:

   saya, kadek Risda Indah Natacya selaku direktur dari PT. Manik sekecap karya.

3. Pertanyaan:
   Apakah **PT. MANIK SEKECAP KARYA** mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan?Mohon penjelasannya!

   Jawaban:

   iya ada sedang mengikuti beberapa tender. Belum ada paket pekerjaan yang sedang berjalan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA INDONESIA

4. Pertanyaan:
   Apakah **PT. MANIK SEKECAP KARYA** menawarkan Peralatan yang sama pada paket pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan?

   Jawaban:

   Tidak ada menawarkan peralatan yang sama pada paket lain.

5. Pertanyaan:
   Apakah **PT. MANIK SEKECAP KARYA** menawarkan Personel yang sama pada paket pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan?

   Jawaban:

   Tidak menawarkan personel yang sama pada paket lain

6. Pertanyaan:
   Keterangan/pernyataan lain.

   Jawaban:

   Tidak ada keterangan / pernyataan lain.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur/Penerima Kuasa
PT. MANIK SEKECAP KARYA



Kadek Ayuda Indah Natasya.

Pokja Pemilihan 08 pada
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali

1. Glodius Mathias Sandy Toendan, S.STP.,M.A
2. I Wayan Dharma Satriawan, S.TI
3. Putu Ari Ratnadewi, S.E
4. I Made Agus Karya Wirawan, S.E.
5. Ni Putu Reza Alvionita Febrianti, S.M



Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

Berita Acara Hasil Pemilihan

PENATAAN AREA PARAHYANGAN DI KAWASAN SUCI BESAKIH DI KABUPATEN KARANGASEM (PURA CATUR LOKA PALA)

Nomor : B.38.000.3.3/17652/P08.P2P/B.PBJEK

Pada hari ini, 14 April 2026, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10113020000
Nama Tender	:	Penataan Area Parahyangan di Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem (Pura Catur Loka Pala)
Nilai Total HPS	:	Rp. 57.480.577.157,54
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 60 Peserta yang mendaftar terdapat 2 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT. MANIK SEKECAP KARYA	Rp. 54.606.548.000,00
2	PT. TUNAS JAYA SANUR	Rp. 55.760.228.826,95
3	CV.INTI KARYA DESAIN	
4	PT. MEGA MESARI GROUP	
5	CV. DWI TUNGGAL JAYA	
6	PT. MELANGIT JAYA MANDIRI	
7	cv. mulia karya utama	
8	CV.MURJAYADI UTAMA	
9	CV.DWITYA PARAMITHA	
10	CV. ARCHIVIL ENGINEERING	
11	PT. ELANG BHUMI PERSADA	
12	PT. SINARBALI BINAKARYA	
13	CV. AL LI SA KONSTRUKSI	
14	PT. DARMASRAYA MITRA AMERTA	
15	PT Geo Indogreen Karya	
16	PT DUTA MAS INDAH	
17	CV. PERMAI	
18	CV. WIRA PRATAMA TEKNIK	
19	PT. DEWATA BALI ELEKTRIK	
	RANCANG MEGAH SEJAHTERA	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

21	CV PERAMA DEWATA
22	GLEDEK ARTHA BALADIKA
23	PT. POLA MITRA JAYA
24	PT Waskita Beton Precast, Tbk
25	PT. AQUIFER BUANA UTAMA
26	PT. GUNAKARYA NUSANTARA
27	CV. GEMILANG SENTOSA
28	CV. KRISYA JAYA UTAMA
29	CV. KARMA YUDHA
30	ADI GANDHA LARAS JAYA
31	PT. PULU GANDING SEJAHTERA
32	PT.PUTRA KUBU KONSTRUKSI
33	PT. MEGA SAKINA RAYA
34	PT. AMORAINDO UTAMA KARYA
35	PT. Setvi Tunas Utama
36	PT. GALA TAMA
37	CV. Catur Dharma Diati
38	CV.GLOBAL PRESISI
39	PT SINAR KERTANEGARA
40	PT. ANUGERAH BANGUN KENCANA
41	CV. MANDAWE
42	PT. PASKINDO DJAYA
43	CV MEGAH KARYATAMA
44	cv. battar
45	PT. TUNAS JAYA NUSANTARA
46	CV JAWARA KONSTRUKSI INDONESIA
47	CV. GEBINA NAFRINA MANDIRI
48	PT. Urban Ritel Internasional
49	CV. KARYA SURYA PRATAMA
50	PT. CANDI BENTAR KARYA
51	CV. MIRUEK TAMAN
52	WANGUN AMERTHA JAYA
53	CV.Ratu Gede
54	PT. GINA KARYA UTAMA
	KRESNA PUTRA KARYA

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA

56	CV. Dian Artha Utama	
57	CV. PRIMA KONSTRUKSI	
58	PT. Sinar Emas Samudra	
59	CV. Amartya Jaya	
60	PT SURYA BALI KONSTRUKSI	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	Rp. 55.760.228.826,95	Rp. 55.760.228.826,95	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	Rp. 54.606.548.000,00	Rp. 54.606.548.000,00	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. TUNAS JAYA SANUR	LULUS	
2	PT. MANIK SEKECAP KARYA	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Bali

ttd.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA INDONESIA

08

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.
BANGGA BUATAN INDONESIA
BANGGA BERWISATA DI INDONESIA